



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN RAYA SETU NO 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021)84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbp3kp@kkp.go.id

Nomor : B.44/BBP3KP/TU.140/II/2026 14 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2025

Yth. Sekretaris Ditjen PDSPKP
Jalan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan SKM Layanan Publik lingkup BBP3KP Triwulan IV Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmadi Sunoko

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**



**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	6
3.1 Jumlah Responden SKM.....	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Layanan	7
3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat UPP BBP3KP Triwulan III Tahun 2025	12
BAB IV. ANALISIS HASIL SKM	14
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	14
4.2 Rencana Tindak Lanjut	15
4.3 Tren Nilai SKM	15
BAB V. KESIMPULAN	17
LAMPIRAN	18
1. Kuesioner	18
2. Hasil Olah Data SKM.....	19
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM TW III TAHUN 2025.....	20

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Sesuai KepMenKP No. 20 Tahun 2025, BBP3KP pada triwulan III tahun 2025 memberikan layanan jasa publik berupa [1] Penggunaan ruang pendingin, *freezer*, dan *cold storage*; [2] Penggunaan peralatan pengolahan; [3] Penggunaan transportasi; [4] Pemeriksaan/pengujian laboratorium; [5] Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela; [6] Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng. Standar Pelayanan yang mengacu kepada KepMenKP tersebut masih dalam proses, (sampai dengan penyerahan revisi Standar Pelayanan untuk masing-masing layanan tersebut), sambil menunggu pelaksanaan FKP yang rencananya akan dilaksanakan akhir bulan Oktober. Sampai laporan ini dibuat, Standar Pelayanan masih di Kepdirjen PDSPKP Nomor 129 Tahun 2024. Berdasarkan KepMenKP tersebut, penting untuk dilakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik melalui pengisian SKM secara rutin.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BBP3KP sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 207 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BBP3KP adalah tim Pelaksana Pelayanan Publik BBP3KP dan tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik WBK dan WBBM BBP3KP.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan secara elektronik menggunakan Tools Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (Susan KKP) melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/179> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Penggunaan *tools* SKM ini merupakan upaya KKP dalam melakukan standardisasi kuesioner, metode pengambilan survei, efektifitas rekapitulasi dan perhitungan data hasil SKM pada seluruh UPP lingkup KKP.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM yaitu:

1. **Persyaratan (U1):** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur (U2):** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian (U3):** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif (U4):** Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5):** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana (U6):** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana (U7):** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8):** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana (U9):** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi masing-masing responden. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dipandu oleh petugas pelayanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dalam jangka waktu Triwulan IV Tahun 2025 (bulan Oktober s.d Desember 2025).

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Jumlah responden sama dengan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari pelayanan yang diberikan dalam satu triwulan yang sedang berjalan.

BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan IV Tahun 2025, jumlah total responden penerima layanan di BBP3KP adalah sebanyak 41 responden, dengan rincian untuk masing-masing layanan sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK LAYANAN		JUMLAH RESPONDEN
1	Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i>	1	Penggunaan pembekuan (<i>freezer</i>)	0
		2	Penggunaan gedung beku (<i>cold storage</i>)	
		3	Penggunaan <i>plugging container</i>	
2	Penggunaan peralatan pengolahan	4	Penggunaan peralatan pengolahan	6
3	Penggunaan transportasi	5	Penggunaan transportasi kendaraan berpendingin/berefrigerasi	0
		6	Penggunaan transportasi pick up	
4	Pemeriksaan / pengujian laboratorium	7	Laporan hasil uji laboratorium	26
5	Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela	8	Sertifikat kesesuaian SNI sukarela	6
6	Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	9	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng	2
		10	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	1

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan profesi adalah sebagai berikut:

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	14	34%
		Perempuan	27	66%
2	Pendidikan	SD ke bawah	0	0%
		SMP	1	2%
		SMA	3	7%
		D3	5	12%
		S1	20	49%
		S2	12	29%
3	Profesi	Wirausaha	3	7%
		Pelaku Usaha KKP	12	29%
		Swasta	11	27%
		PNS	12	29%
		Pelajar	3	7%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Layanan

3.2.1 Penggunaan ruang pendingin, *freezer*, dan *cold storage*

Produk Layanan :

- Penggunaan pembekuan (*freezer*):
- Penggunaan gedung beku (*cold storage*)
- Penggunaan *plugging container*

Layanan untuk 3 produk layanan pada triwulan 3 sedang dalam proses perbaikan dan penataan operasional, sehingga belum dapat menerima permohonan penggunaan. Oleh karena itu, tidak ada SKM yang dilaksanakan untuk layanan ini.

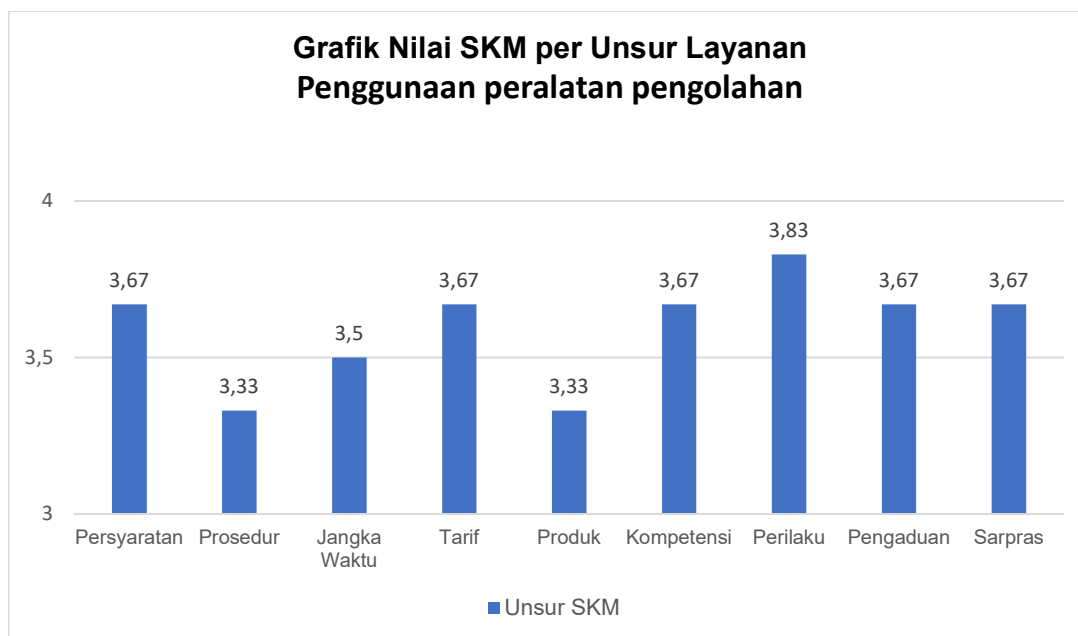
3.2.2 Penggunaan peralatan pengolahan

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap produk layanan Penggunaan peralatan pengolahan menunjukkan nilai IKM Unit Layanan sebesar 89.81 dengan predikat kategori A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan peralatan pengolahan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,67	3,33	3,50	3,67	3,33	3,67	3,83	3,67	3,67
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	89.81 (A, Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan peralatan pengolahan



3.2.3 Penggunaan transportasi

Produk Layanan :

- Penggunaan transportasi kendaraan berpendingin/berefrigerasi
- Penggunaan transportasi pickup

Layanan penggunaan transportasi pada triwulan 3 sedang dalam proses perbaikan dan penataan operasional, sehingga belum dapat menerima permohonan penggunaan. Oleh karena itu, tidak ada SKM yang dilaksanakan untuk layanan ini.

3.2.4 Pemeriksaan/pengujian laboratorium

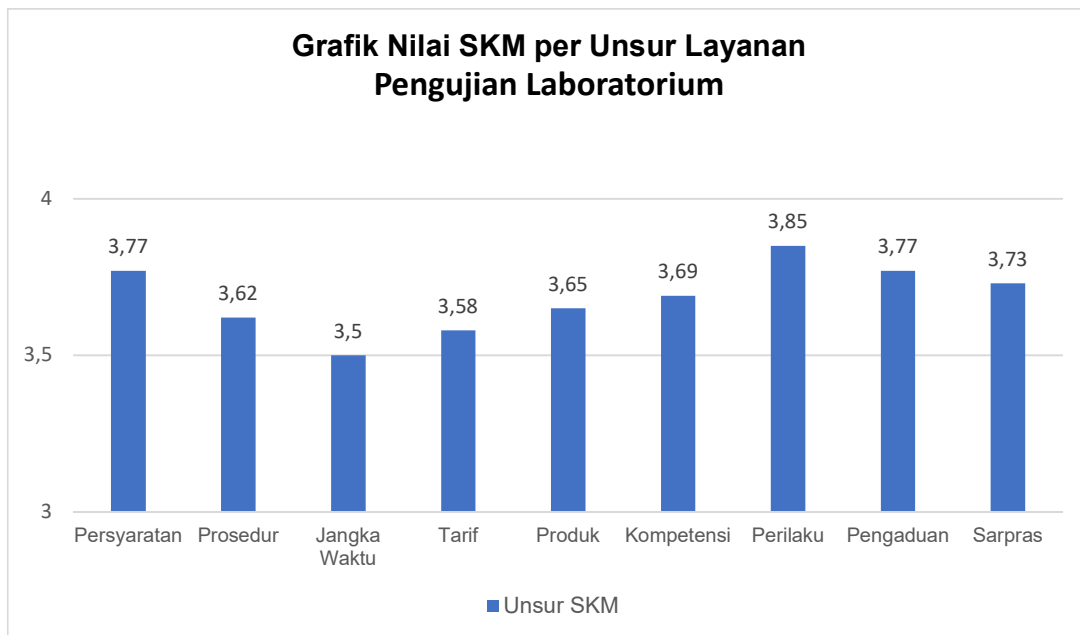
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap produk layanan Laporan hasil uji laboratorium menunjukkan nilai IKM Unit Layanan sebesar 92.09 dengan predikat kategori

A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Pengujian Laboratorium

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,77	3,62	3,50	3,58	3,65	3,69	3,85	3,77	3,73
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92,09 (A, Sangat Baik)								

Gambar 2. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Pengujian Laboratorium



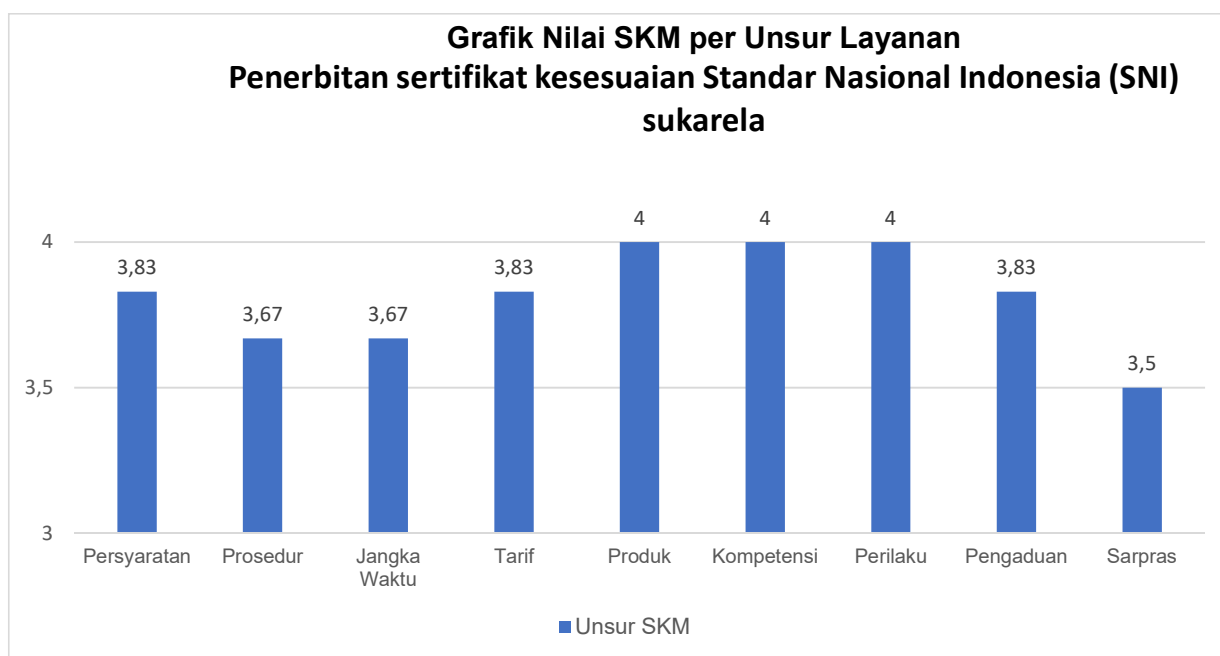
3.2.5 Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap produk layanan Sertifikat kesesuaian SNI sukarela menunjukkan nilai IKM Unit Layanan sebesar 95,37 dengan predikat kategori **A (Sangat Baik)** sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,83	3,67	3,67	3,83	4,00	4,00	4,00	3,83	3,50
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,37 (A, Sangat Baik)								

Gambar 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela



3.2.6 Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap produk layanan:

- a. Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng

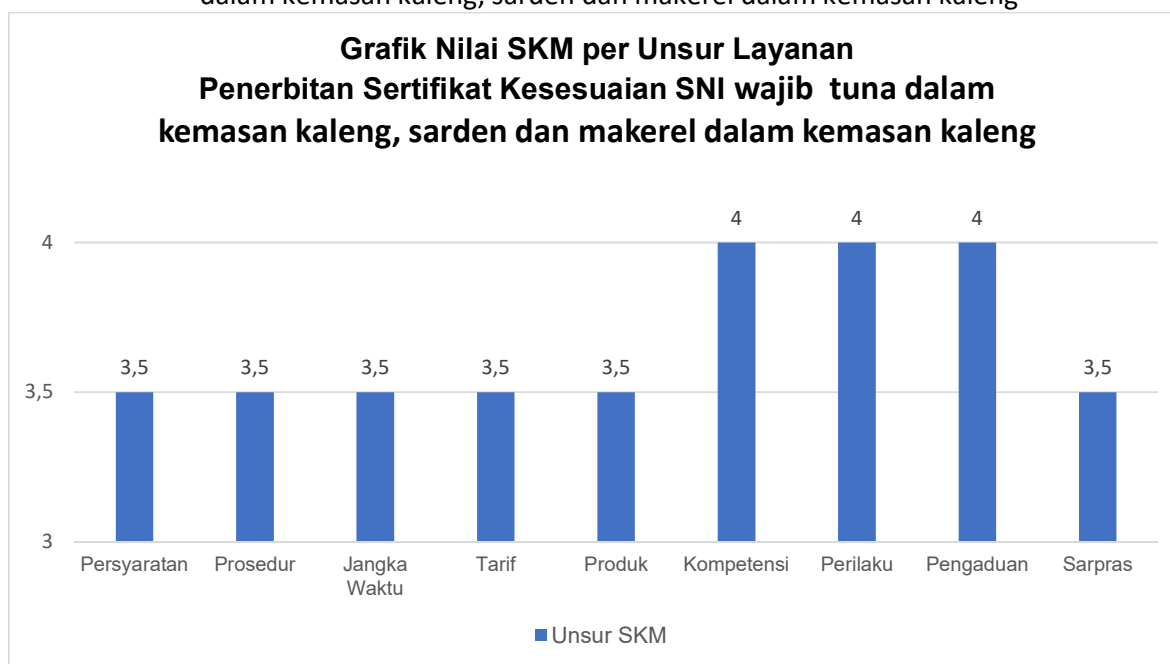
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap produk layanan Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng sebesar 91,67 dengan predikat kategori A

(Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	3,50
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,67 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 4. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng



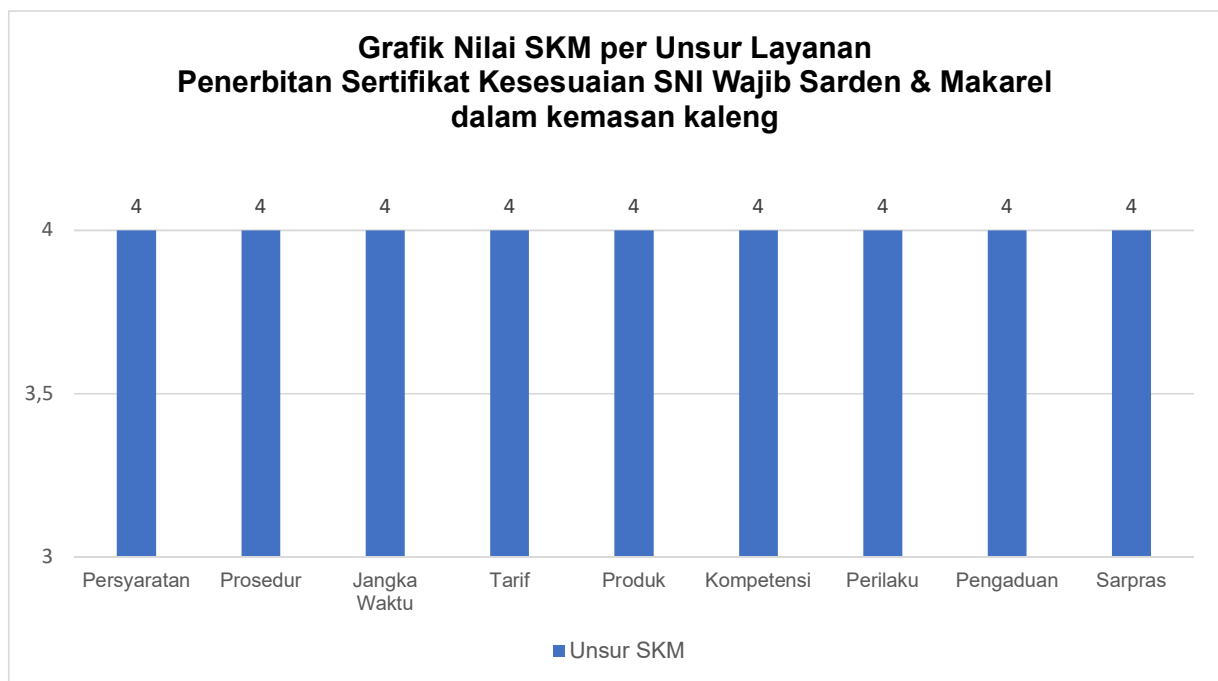
- b. Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan makerel dalam kemasan kaleng

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sarden dan makerel dalam kemasan kaleng menunjukkan nilai IKM Unit Layanan sebesar 100 dengan predikat kategori A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sarden dan makarel dalam kemasan kaleng

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kategori	B	B	B	B	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	100 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 5. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sarden dan makarel dalam kemasan kaleng



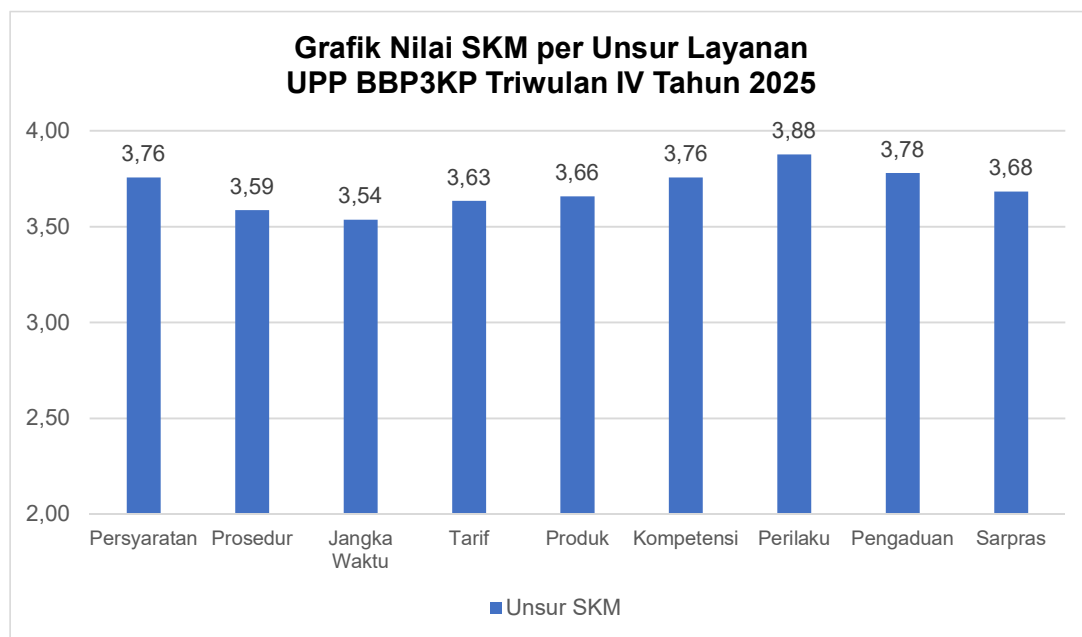
3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat UPP BBP3KP Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil SKM untuk seluruh layanan publik yang diselenggarakan oleh BBP3KP untuk periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan total jumlah responden sebanyak 41 adalah sebesar 92,41 dengan predikat kategori A (Sangat Baik), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai SKM per Unsur Pelayanan BBP3KP Triwulan IV 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,76	3,59	3,54	3,63	3,66	3,76	3,88	3,78	3,68
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92,41 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 6. Nilai SKM per Unsur Layanan UPP BBP3KP Triwulan IV Tahun 2025



BAB IV. ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil penilaian IKM untuk seluruh jenis layanan di BBP3KP pada bab sebelumnya (Tabel 6), maka dapat dikelompokkan kinerja unit pelayanan berdasarkan unsur pelayanan memiliki nilai 92,41 atau Kinerja Sangat Baik (A).

Tiga unsur yang mendapatkan penilaian paling rendah dari responden adalah sebagai berikut:

1. Prosedur (U2) – Nilai 3,59 (Sangat Baik)
2. Jangka Waktu (U3) – Nilai 3,54 (Sangat Baik)
3. Tarif (U4) – Nilai 3,63 (Sangat Baik)

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan IV Tahun 2025 untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh BBP3KP, terdapat beberapa permasalahan dan masukan/saran yang diberikan oleh pengguna layanan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Permasalahan dan Masukan/Saran per Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	PERMASALAHAN DAN MASUKAN/SARAN
1.	Pemeriksaan/pengujian laboratorium	- Mohon untuk menginformasikan apabila ada keterlambatan hasil analisa dari waktu yang seharusnya - Untuk kedepannya apabila ada keterlambatan hasil analisa mohon diinformasikan kepada kami - Pelayanan oke, mungkin proses lab bisa dipercepat
2.	Penggunaan peralatan pengolahan	- lebih meningkatkan lagi kebersihan dan sanitasi peralatan dan pengolahan
3.	Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela	- Pelayanan sudah sangat bagus, Mungkin sedikit saran untuk dapat di informasikan progres hasil pengujiannya secara berkala sehingga kami pemilik usaha dapat mengetahui sampai mana prosesnya,.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk masing-masing unsur prioritas per jenis layanan publik BBP3KP ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut

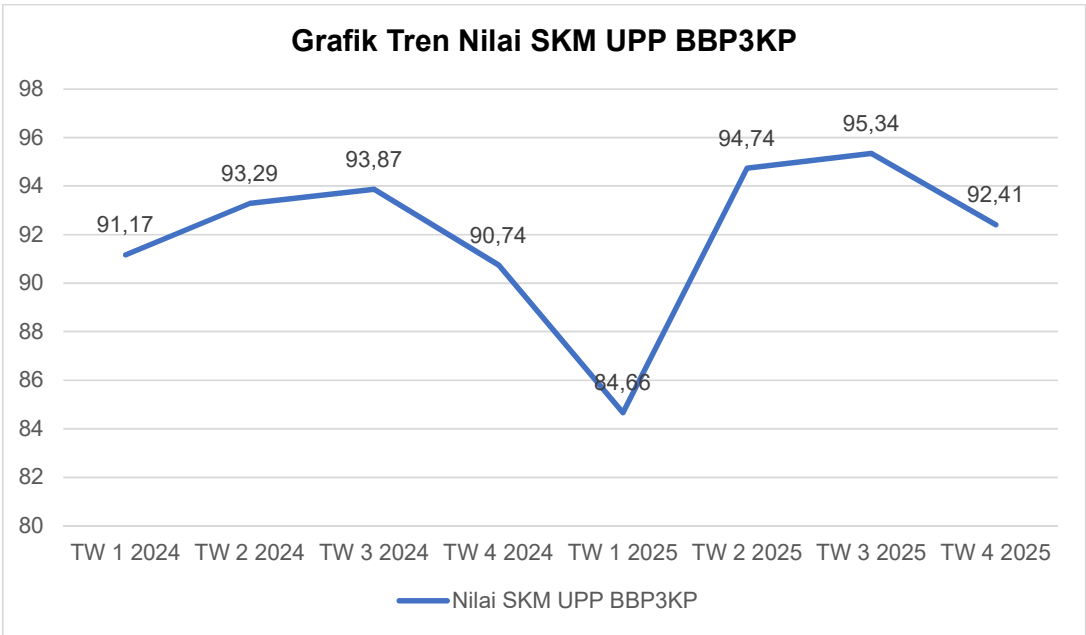
NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM /KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Prosedur (U2)	1. Penyusunan dan Penerapan SOP Penanganan Keterlambatan (<i>Force Majeure</i>) Laboratorium akan menyusun dan menerapkan SOP penanganan keterlambatan hasil analisa akibat kondisi <i>force majeure</i> (misalnya kerusakan alat), termasuk ketentuan penyampaian informasi kepada pelanggan apabila terjadi keterlambatan beserta estimasi waktu penyelesaian hasil uji. 2. Perencanaan Sistem Pemberitahuan Keterlambatan Hasil Uji Laboratorium akan mengusulkan sistem pemberitahuan keterlambatan hasil analisa kepada pelanggan (misalnya melalui notifikasi WhatsApp berbasis aplikasi laboratorium)	TW 1 - 2026	Timja Pengujian
2.	Tarif (U4)	Melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam kebersihan peralatan pengolahan dan sanitasi di workshop terutama setelah pemakaian.	TW 1 - 2026	Timja UJT
3.	Tarif (U4)	Menunjuk petugas khusus yang dapat dihubungi untuk konsultasi dalam pemberian layanan untuk memudahkan klien memantau progres layanan.	TW 1 - 2026	Timja PK

a. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan publik di BBP3KP berdasarkan hasil SKM hingga Triwulan IV Tahun 2025 ditampilkan pada Gambar 7.

Gambar 6. Grafik Tren Nilai SKM UPP BBP3KP Tahun 2025



Berdasarkan grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2025, walaupun ada penurunan dari Triwulan III ke Triwulan IV pada Unit Penyelenggara Pelayanan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

BAB V. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode triwulan IV mulai Oktober hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di UPP BBP3KP, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik (A) dengan nilai SKM 92,41.
- Keseluruhan layanan publik BBP3KP mendapatkan nilai SKM dengan kategori A (Sangat Baik) dengan jumlah total responden 41 orang pengguna layanan.
- Unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah Prosedur (U2), Jangka Waktu (U3), dan Tarif (U4).

Jakarta, 14 Januari 2026
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmadi Sunoko
NIP 19801004 200312 1 003

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
Laporan hasil uji laboratorium

Data Responden

Waktu Survey

13-Jan-2026 09:33

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan
☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki
☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun
☐ 25 s/d 45 Tahun
☐ 46 s/d 60 Tahun
☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ D3
☐ S1
☐ S2
☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN
☐ TNI/POLRI
☐ Pelaku Usaha KKP
☐ Pegawai Swasta
☐ Wirausaha Non KKP
☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah
☐ Mudah
☐ Kurang mudah
☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

☐ Sangat Cepat
☐ Cepat
☐ Kurang cepat
☐ Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit Form

*)Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Olah Data SKM

10 entries per page

pds

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
djpbs	Direktorat Pemberdayaan Usaha	2025	4	5.00	93.06	6
djpbs	Direktorat Pemasaran	2025	4	4.83	94.91	6
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	4.95	92.41	41

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	Laporan hasil uji laboratorium	26	3.77	3.62	3.50	3.58	3.65	3.69	3.85	3.77	3.73	3.68	92.09
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	Penggunaan peralatan pengolahan	6	3.67	3.33	3.50	3.67	3.33	3.67	3.83	3.67	3.67	3.59	89.81
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng	2	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	3.50	3.67	91.67
djpbs	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2025	4	Sertifikat kesesuaian SNI sukarela	6	3.83	3.67	3.67	3.83	4.00	4.00	4.00	3.83	3.50	3.81	95.37

3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III – 2025**



**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka BBP3KP perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini

dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh BBP3KP periode Triwulan III 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode III - 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,77	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,77	A
3	Waktu Penyelesaian	3,74	A
4	Biaya/Tarif	3,80	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,82	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,92	A
7	Perilaku Pelaksana	3,95	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,84	A
9	Sarana dan Prasarana	3,72	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena angka IKM pada unsur tersebut lebih rendah dibandingkan dengan unsur lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas

perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Prosedur (U2)	- Melakukan peningkatan sarana pengujian dengan pembelian alat GC-MS untuk menambah ruang lingkup uji, termasuk analisis asam lemak, alkohol, dan mikroplastik. - Verifikasi metode dan validasi parameter uji garam untuk perluasan ruang lingkup akreditasi.				√	Timja Pengujian
2	Jangka Waktu (U3)	BBP3KP berkoordinasi dengan tim Pengelola Website untuk pembaruan konten (penambahan informasi kontak layanan (customer service / helpdesk) pada laman resmi laboratorium BBP3KP di bagian "Hubungi Kami")				√	Timja Pengujian Timja Dukman Timja Diseminasi
3	Sarana dan Prasarana (U9)	- Berkoordinasi dengan pengelola website untuk evaluasi kendala akses link hasil uji. - Melakukan pengujian internal (user test) dan pembenahan tampilan / stabilitas server agar pengguna dapat mengakses hasil uji secara mandiri tanpa kendala.				√	Timja Pengujian Timja PK Timja Dukman Timja Diseminasi

		- Menyusun mekanisme penanganan gangguan akses hasil uji untuk memastikan tindak lanjut cepat bila terjadi keluhan serupa.					
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Dokumentasi Kegiatan
1	Pelayanan dan parameter uji laboratorium	Melakukan peningkatan sarana pengujian dengan pembelian alat GC-MS untuk menambah ruang lingkup uji, termasuk analisis asam lemak, alkohol, dan mikroplastik. - Melakukan verifikasi metode dan validasi parameter uji garam untuk perluasan ruang lingkup akreditasi.	- Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana laboratorium, telah dilakukan pengadaan alat GCMS. Serah terima alat (BAST) dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025, serta pelatihan pengoperasian alat telah dilaksanakan pada tanggal 1–3 Desember 2025. Selanjutnya, untuk penambahan ruang lingkup pengujian asam lemak, alkohol, dan mikroplastik, akan dilakukan kegiatan verifikasi metode pengujian pada tahun 2026. - Pada tahun 2025, verifikasi metode pengujian garam dalam rangka perluasan ruang lingkup akreditasi telah selesai dilaksanakan untuk parameter NaCl, Ca, Mg, sulfat, dan iodium (sebagai KIO_3). Selanjutnya, pada tahun 2026 kegiatan verifikasi metode pengujian garam akan dilanjutkan untuk parameter logam berat. Adapun pengajuan	

			perluasan/penambahan ruang lingkup akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional direncanakan pada Triwulan II tahun 2026.	
2	Nomor customer service belum ada di website untuk dapat membantu bila ada pertanyaan	BBP3KP berkoordinasi dengan tim Pengelola Website untuk pembaruan konten (penambahan informasi kontak layanan (customer service / helpdesk) pada laman resmi laboratorium BBP3KP di bagian “Hubungi Kami”)	Nomor kantor BBP3KP sudah ditambah di web bbp3kp.com & web KKP Nomor customer service telah tersedia pada Web PPID KKP	 The screenshot displays the official website of BBP3KP (Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan). The top section includes the logo and navigation links for 'Profil' and 'Informasi Publik'. Below this, the full name of the institution and its affiliation with the Directorate General of Product Quality and Food Safety are listed. Contact details such as the address in Jakarta, phone, fax, and email are provided. A lower section features a profile of a representative, RAHMADI SUNOKO, with a photo and a wheelchair accessibility icon. The bottom part of the page contains a 'PPID BALAI BESAR' (Public Information Disclosure) section with a 'Hubungi Kami' (Contact Us) button.

3	Kendala website BBP3KP.com terkait akses link hasil uji, stabiilitas server, mekanisme penanganan gangguan akses hasil uji	- Berkoordinasi dengan pengelola website untuk evaluasi kendala akses link hasil uji. - Melakukan pengujian internal (user test) dan pembenahan tampilan / stabilitas server agar pengguna dapat mengakses hasil uji secara mandiri tanpa kendala. - Menyusun mekanisme penanganan gangguan akses hasil uji untuk memastikan tindak lanjut cepat bila terjadi keluhan serupa.	Timja Pengujian telah menyampaikan nota dinas kepada Kepala BBP3KP dengan tembusan kepada Ketua Timja Dukungan Manajerial dan Ketua Timja Diseminasi pada tanggal 18 Desember 2025 sebagai upaya pengusulan perbaikan dan koordinasi serta pengembangan aplikasi layanan pengujian pada website BBP3KP agar dapat menjembatani tindak lanjut atas saran dan masukan masyarakat	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOTA DINAS NOMOR 682/BBP3KP/TU.440/XII/2025 Yth : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Dari : Ketua Tim Kerja Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan Perihal : Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 terhadap Layanan Pengujian Lampiran : - Tanggal : 18 Desember 2025 Sehubungan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 terhadap layanan pengujian laboratorium BBP3KP, beberapa masukan dan saran dari pengguna layanan berbasis aplikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Informasi persyaratan pengujian pada aplikasi website BBP3KP masih membingungkan, dan berharap ke depan dapat dibantu oleh tim petugas (customer service) agar informasi terkait layanan lebih mudah dipahami; 2. Beberapa responden mengharapkan adanya nomor customer service yang dicantumkan pada website untuk mempermudah komunikasi apabila terdapat pertanyaan; 3. Secara umum layanan dinilai baik, namun platform akses hasil uji sering terkendala, beberapa pengguna tidak dapat membuka tautan hasil uji dan akhirnya menerima laporan hasil uji langsung dari petugas administrasi. Menindaklanjuti masukan dan saran tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik BBP3KP terutama kelancaran komunikasi dengan pengguna layanan, kami berharap adanya perbaikan dan pengembangan aplikasi layanan pengujian pada website BBP3KP oleh developer aplikasi (PT Pesat Agni Solusi). Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut, terima kasih.  Ditandatangani secara Elektronik Sri Daryanti Tembusan: 1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial 2. Ketua Tim Kerja Diseminasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
---	--	---	--	--

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. BBP3KP telah menindaklanjuti semua rencana tindak lanjut sebagaimana dapat terlihat pada realisasi tindak lanjut.
2. BBP3KP telah menindaklanjuti rekomendasi survei pada Triwulan III Tahun 2025, dengan melakukan verifikasi metode pengujian garam; pencatuman nomor kantor BBP3KP di web bbp3kp.com & web KKP, no *Customer Service* di web PPID; timja pengujian sudah bersurat dengan nota dinas kepada Kepala BB3KP untuk meminta perbaikan dan pengembangan aplikasi layanan pengujian pada website BBP3KP.com

Jakarta, 14 Januari 2026
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmadi Sunoko
NIP 19801004 200312 1 003